

**PENGUSIRAN PENCARI SUAKA OLEH AUSTRALIA MENURUT KONVENSI
STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951
(THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**CAKRA TRIWIBAWA
NIM. 105010100111048**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **PENGUSIRAN PECARI SUAKA OLEH AUSTRALIA
MENURUT KONVENSI PENGUNGSI TAHU 1951
(THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE
STATUS OF REFUGEES)**

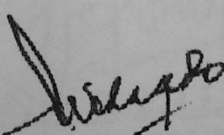
Identitas Penulis :

a. **Nama** : **Cakra Triwibawa**
b. **NIM** : **105010100111048**
c. **Konsentrasi** : **Hukum Internasional**

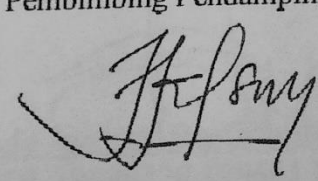
Jangka Waktu Penelitian : **3 Bulan**

Disetujui pada tanggal : **13 November 2014**

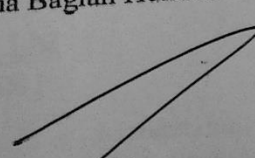
Pembimbing Utama


SETYO WIDAGDO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590320 198601 1 003

Pembimbing Pendamping


IKANINGTYAS S.H., LL.M.
NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


NURDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUSIRAN PENCARI SUAKA OLEH AUSTRALIA MENURUT KONVENSI
STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951
(THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES)**

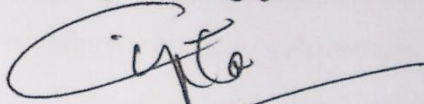
Disusun Oleh :

CAKRA TRIWIBAWA

NIM. 105010100111048

Skripsi ini telah disetujui oleh Majelis Penguji pada tanggal :

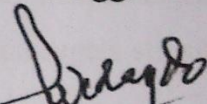
Ketua Majelis Penguji



Sucipto, S.H., M.H

NIP. 19501211 198010 1 001

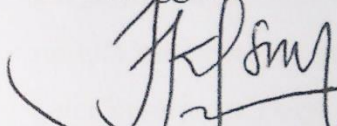
Anggota



Setyo Widagdo, S.H., M.Hum

NIP. 19590320 198601 1 003

Anggota



Ikaningtyas, S.H., LLM

NIP. 19810531 200501 2 002

Anggota



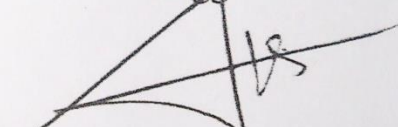
Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn

NIP. 19590320 198601 1 003

Ketua Bagian

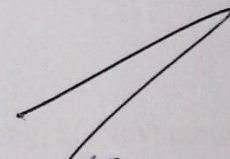
Hukum Internasional

Anggota



Agis Ardhiansyah, S.H., LLM

NIP. 19840313 200912 1 001

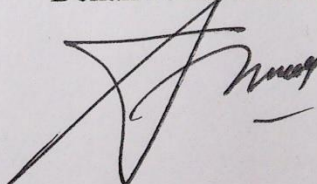


Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan	v
Summary	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Pencari Suaka dan Pengungsi.....	12
1. Pengertian Pencari Suaka.....	12
2. Pengertian Pengungsi.....	15
B. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Mengenai Pengungsi Internasional.....	19
C. Kajian Tentang Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.....	25
D. Kajian Tentang Kedaulatan Negara dan Tanggung Jawab Negara	30
E. Kajian Umum Tentang <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR)	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Jenis Hukum.....	39
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	41
F. Definisi Konseptual	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Dasar Pertimbangan Hukum Australia Melakukan Pengusiran Terhadap Para Pencari Suaka	43
1. Australia Sebagai Negara Tujuan Pencari Suaka	43
2. Dasar Pertimbangan Hukum Pemerintah Australia Melakukan Pengusiran Para Pencari Suaka	48

B. Pengusiran Pencari Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.....	53
1. Australia Sebagai Negara Peserta Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.....	53
2. Pengungsi Berdasarkan Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.....	58
3. Pengusiran Pencari Suaka Berdasarkan Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.....	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Cakra Triwibawa, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2014, PENGUSIRAN PENCARI SUAKA OLEH AUSTRALIA MENURUT KONVENSI STATUS PENGUNGSI TAHUN 1951 (*THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES*), Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Ikaningtyas S.H., LL.M.

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait tindakan pengusiran pencari suaka oleh Australia menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees*). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran prinsip *non-refoulment* yang dilakukan oleh Australia dalam pengusiran pencari suaka.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memilih rumusan masalah: (1) Apa dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari suaka ? (2) Apakah pengusiran pencari suaka oleh Australia dapat dibenarkan menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 ?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *case approach* dan *statute approach*. Data primer dan sekunder diperoleh, dianalisis dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan tujuan mengolah data-data yang diperoleh dari buku digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar pertimbangan hukum Australia dalam melakukan pengusiran pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan perlindungan perbatasan yang disebut *Operation Sovereign Borders* atau Operasi Perbatasan Kedaulatan. Australia dalam melakukan operasi ini memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah operasi ini dilakukan untuk penanggulangan kejahatan lintas negara yang masih banyak terjadi dengan alasan pengungsian. Alasan kedua adalah besarnya biaya yang dikeluarkan Australia dalam melakukan penanganan pengungsi karena Australia merupakan negara tujuan pencari suaka. Pengusiran pencari suaka yang dilakukan Australia dalam Operasi Kedaulatan Perbatasan menerima banyak kecaman dari berbagai pihak. Pengusiran yang dilakukan oleh Australia telah melanggar prinsip *non-refoulment* yang tercantum pada pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951.

SUMMARY

Cakra Triwibawa, *International Law*, Law Faculty of Brawijaya University, November 2014, *THE EXPULSION OF ASYLUM SEEKER BY AUSTRALIA ACCORDING TO THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES*, Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Ikaningtyas, S.H., LL.M.

The author choose issue about the expulsion of asylum seeker by Australia according to The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees) in this research. This topic is chosen because of breaking non-refoulment which have done by Australia in expulsion of asylum seeker.

According that, the research is using judicial normative method with case approach and statute approach. The primary and secondary data are gotten, analyzed by using library research method which processes literature to solve the issue.

The result of this research shows that the Australia legal consideration to expel the asylum seeker is implementing borders protection regulation called Operation Sovereign Borders. Australia has two reasons to implement this operation. First, this operation is repressive of transnational crime that using refuge reason. Second, Australia has spent much money to handle refuge problem. The Operation Sovereign Borders has complained by many parties. The expulsion by Australia has broken non-refoulment that mentioned in article 33 (1) The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees.